

ANALISIS KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TINGKAT PROPINSI DI INDONESIA

Aditya Wardhana^{1*)} dan Zainuddin Iba²⁾

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nurtanio Bandung

^{*)} pesona.indonesia@yahoo.com

² Dosen STIE Kebangsaan Bireuen Aceh

ABSTRACT

The Kredit Usaha Rakyat (KUR) program was born as a response from presidential instruction (Inpres) no. 6 / 2007 about policy acceleration real sector development and empowerment of micro business, small, and medium enterprises, especially the reform of the financial sector. Expected the KUR program could alleviate poverty in line with the master plan for acceleration and extension the reduction of poverty level in Indonesia (MP3KI). In the implementation of the funds, or the implementation of the program there are three important pillars namely: a government that serves help and support the implementation of the provision of credit and credit insurance debtors, as well as the preparation of a candidate company warrantor who act as surety for credit/ financing already channeled by banks, and banking as recipients of assurance well-functioned channeling credits to UMKM and cooperatives by the use of internal funds each executing bank. The business of which were financed with the funding for the kur program was a productive feasible, but had not bankable. The kur program continue to increase the performance of distribution

Keywords : Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan alam yang Usaha mikro dan kecil merupakan usaha ekonomi riil masyarakat yang terbukti mampu bertahan dari resesi ekonomi. Disamping itu, sektor pertanian/ peternakan/ perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, perindustrian, dan Koperasi dan UMKM harus diberikan prioritas dan menjadi perhatian pemerintah, mengingat sektor tersebut sangat strategis bagi kehidupan

sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam rangka membantu permodalan dan memberdayakan para pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, koperasi dan UMKM pada umumnya, pemerintah telah meluncurkan skim kredit program yang dapat meningkatkan akses ke perbankan dengan skema penjaminan kredit yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengemba-

ngan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/ MoU*) antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan addendum ke IV pada tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam pelaksanaan atau implementasi program KUR, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit dan penjaminan kredit serta penyiapan calon debitur, perusahaan penjamin yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan, dan perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing bank pelaksana. Usaha yang dibiayai dengan program pembiayaan KUR merupakan usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*.

Pada tahun 2013, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 36 triliun. Angka ini naik dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 34 triliun. Tahun 2013 ini, KUR tersebut akan dibagikan kepada bank penyalur KUR yaitu: BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BTN, dan 26 Bank Pembangunan Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. (Tribun Jabar, Februari 2013). Secara nasional, sampai bulan Mei 2013, dari tabel 3. di bawah ini terlihat bahwa dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 36 triliun KUR sudah mencapai Rp. 18,103 triliun atau 50,3%. Diharapkan 7 bulan yang tersisa di Tahun 2013 Bank pelaksana dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penambahan Bank Pelaksana diharapkan dapat mendorong percepatan penyaluran KUR kepada UMKM

yang *visible* namun belum *bankable* (Komite KUR, Mei 2013)

Sesuai tugas Pemerintah Provinsi terkait percepatan dan perluasan penyaluran KUR yaitu melakukan: (1) inventarisasi dan penyiapan data laporan perkembangan penyaluran KUR, (2) pemantauan, monitoring dan evaluasi implementasi KUR, (3) koordinasi dengan pihak-pihak terkait KUR di daerah seperti bank Indonesia, Bank Pelaksana Kantor Cabang dan Perusahaan Penjaminan di Daerah, (4) mengembangkan kebijakan dan rencana tindak di daerah terkait KUR, maka diperlukan kajian terhadap kinerja percepatan perluasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tingkat Pemerintah Provinsi khususnya pada sektor pertanian/ peternakan/perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, perindustrian, dan Koperasi dan UMKM sebagai dasar penyusunan Pedoman Teknis Percepatan Perluasan Penyaluran KUR di tingkat Provinsi.

Berkaitan dengan hal di atas, lalu yang menjadi masalah “Bagaimana kinerja implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tingkat Provinsi di Indonesia”?.

2. Tinjauan Pustaka

Kerangka berpikir dan legalitas dalam rangka percepatan perluasan penyaluran KUR yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi meliputi :

- a) Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan yang mengamanatkan seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi) harus menyusun rencana tindak dalam peningkatan dan perluasan KUR untuk Sektor Hulu
- b) Keputusan Deputi Bidang Koordinasi pada Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, tanggal 25 Januari 2010, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir No. KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR, tanggal 1 Februari 2012.

Pemerintah Provinsi dapat menerbitkan berbagai kebijakan terkait percepatan perluasan penyaluran KUR di tingkat provinsi sepanjang tidak bertentangan dengan poin a) dan b) diatas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di propinsi Jawa Tengah yang menjadi pilot project terbaik dalam penyakluran KUR di tingkat propinsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Agustus 2012 hingga Mei 2013 dalam bentuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan variabel penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Menurut Malhotra (2010: 106) bahwa penelitian deskriptif dapat dilakukan untuk menggambarkan karakteristik kelompok seperti konsumen, tenaga penjual, organisasi, atau wilayah pasar atau yang relevan dengan penelitian, mengestimasi presentase unit yang dispesifikasi dalam populasi, menunjukkan suatu perilaku tertentu, menentukan persepsi atas karakteristik suatu produk, menentukan tingkat keterkaitan variabel pemasaran, serta membuat suatu prediksi khusus. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai kinerja implementasi program KUR di tingkat propinsi di Indonesia. Malhotra (2010: 211) menyatakan bahwa dalam mencari jawaban rumusan masalah, pengambilan data dilakukan menggunakan metode survey sebagai metode penelitian yang dilakukan melalui penggunaan kuesioner terstruktur yang diberikan pada sample suatu populasi, dan dirancang untuk menghasilkan informasi spesifik dari responden.

Sumber data sekunder diperoleh dari Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kantor Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, dan Dinas terkait seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian. Sedangkan sumber data primer diperoleh dari Pejabat Kementerian terkait dan para SKPD di Propinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja yang terkait penyaluran KUR mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Propinsi.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini meliputi :

- Study Approach.* Pendekatan ini diimplementasikan pada saat persiapan penyusunan Petunjuk Teknis KUR di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang meliputi studi pendahuluan (initial study/ desk study) dan analisis data awal yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi dan persiapan materi presentasi Focus Group Discussion (FGD).
- Consultancy Approach.* Pendekatan konsultasi dilakukan pada seluruh tahapan kajian ini.
- Participatory Approach.* Pendekatan ini digunakan pada saat FGD guna mempersiapkan Petunjuk Teknis di tingkat Pemerintah Provinsi.
- Legal Approach.* Pendekatan ini diimplementasikan juga pada saat *Study Approach*

Tahapan pengumpulan dan pengolahan data dapat dijelaskan pada bagan berikut ini



Gambar 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam kajian ini meliputi :

- Data kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai KUR (seperti Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Penyaluran KUR Provinsi Jawa Tengah)
- Data terkait anggaran untuk mendukung program/ kegiatan implementasi KUR (termasuk program pembiayaan lainnya)
- Data rangkaian program/ kegiatan terkait dengan program KUR yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Data kegiatan sosialisasi KUR yang telah dilakukan oleh Pemprov. Jawa Tengah
- Data kegiatan pendampingan calon dan debitur KUR yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah

- f) Data kegiatan monitoring dan evaluasi program KUR yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah
- g) Data inventarisasi debitur KUR yang telah dibina oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- h) Dokumen Petunjuk Teknis KUR tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i) Data penyiapan calon debitur KUR yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j) Data aliran informasi penyaluran KUR antar SKPD Kabupaten/ Kota, SKPD Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin maupun dengan stakeholders lainnya.
- k) Data kegiatan pendukung lain dalam pengembangan program KUR yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 7) Menjalin kerjasama dengan Bank Pelaksana dalam penilaian kelayakan usaha bagi calon debitur
- 8) Melakukan inventarisasi data debitur KUR dan laporan realisasi nominal penyaluran KUR berdasarkan sektor usaha dari Perusahaan Penjamin (Jamkrindo dan Askrimdo), Bank Pelaksana, dan Bank Indonesia
- 9) Melakukan klusterisasi penerima pembiayaan dan sudah menetapkan sasaran utama calon debitur KUR yaitu pasca penerima Bansos/ klaster 2
- 10) Membentuk Tim Kerja Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Provinsi dengan berdasarkan SK Gubernur
- 11) Sudah melakukan penetapan sasaran prioritas usaha yang dibiayai KUR berbasis pada komoditas unggulan daerah
- 12) Melakukan koordinasi dan melakukan rapat evaluasi implementasi KUR tingkat Provinsi baik secara vertikal dengan Kementerian Teknis dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun secara horizontal dengan Dinas Teknis Provinsi maupun pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia, Bank Pelaksana, dan Perusahaan Penjamin

4. Pembahasan

Hasil analisis data kajian terhadap implementasi percepatan perluasan penyaluran KUR di tingkat Pemerintah Provinsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- A. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan hal-hal terkait percepatan penyaluran KUR sebagai berikut :
 - 1) Melakukan sinergitas dengan stakeholders KUR antara lain dengan Bank Indonesia, Bank Pelaksana, Pusat Koperasi Syariah, dan Dinas Teknis terkait
 - 2) Dalam rangka sosialisasi telah mengalokasikan anggaran untuk penguatan KUR
 - 3) Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menginventarisasi data calon debitur potensial yang bisa mengakses KUR
 - 4) Merekomendasikan data calon debitur KUR kepada bank pelaksana
 - 5) Memiliki daftar koperasi binaan yang siap dibiayai KUR dan yang siap menjadi lembaga linkage penyalur KUR yang sudah disampaikan kepada Bank Pelaksana
 - 6) Membantu Kementerian Teknis dalam mengusulkan tenaga pendamping melalui Dinas Teknis guna membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai target penyiapan debitur
- B. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum melakukan hal-hal terkait percepatan perluasan penyaluran KUR sebagai berikut :
 - 1) Belum membuat pedoman teknis penyaluran KUR
 - 2) Belum memiliki aliran informasi yang jelas terkait penyaluran KUR antar SKPD Di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dengan stakeholders lainnya
 - 13) Melakukan promosi program KUR kepada calon debitur, penyelenggara pasar UKM, pemberdayaan potensi UKM melalui klaster-klaster ekonomi, dan kegiatan akad KUR massal (MURI) dengan bekerjasama dengan Bank Pelaksana dan Pemerintah Kab/Kota
 - 14) Memantau kegiatan percepatan KUR yang dilakukan oleh pihak bank pelaksana KUR
 - 15) Menyampaikan Surat Edaran ke seluruh SKPD Kabupaten/Kota terkait pembentukan tim pelaksana percepatan KUR di tingkat kabupaten/kota

seperti Bank Indonesia, Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin, dan lainnya

C. Kondisi internal yang dihadapi Pemerintah Provinsi dalam percepatan KUR adalah:

- 1) Pencapaian progres pengembangan penyebaran KUR di Dinas Teknis berbeda-beda, ada yang maju dan ada yang perlu didorong
- 2) Belum memiliki SOP/PEDUM/JUKNIS/JUKLAK tentang KUR
- 3) Belum optimalnya sinergitas dalam penyediaan data debitur KUR dengan dengan lembaga terkait dalam program KUR (contoh : Bank Indonesia, Perbankan, dan Perusahaan Penjamin)
- 4) Belum adanya kebijakan daerah dan pedoman yang memfasilitasi sinergitas antara UMKM-K dengan stakeholders
- 5) Belum maksimalnya penggunaan data-base penerima dana kredit/ pembiayaan usaha lainnya (misalnya eks skema kredit lainnya)
- 6) Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan kesulitan mencari calon debitur karena :
- 7) Resiko dalam pengembangan usaha yang cukup tinggi antara lain kebakaran, illegal logging, hama penyakit, sifat usaha yang musiman, umur kayu yang siap panen lebih dari 5 tahun dll.
- 8) Usaha hasil hutan bukan kayu masih belum tersosialisasi KUR dengan baik
- 9) Sebagian perbankan jaringan pelayanan terbatas tidak sampai pada *grass root level*.
- 10) Terbatasnya koperasi yang dapat direkomendasikan sebagai lembaga linkage penyalur KUR terhadap UMKMK
- 11) Belum adanya pengaturan aliran informasi terkait KUR dari setiap stakeholder (Kemenko, Kementerian Teknis, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Bank Pelaksana, Lembaga Linkage, Perusahaan Penjamin)
- 12) Kesulitan memperoleh data debitur KUR yang lengkap sehingga diperlukan database debitur KUR
- 13) Rekomendasi calon debitur yang diajukan oleh kementerian Koperasi dan UMKM relatif banyak yang belum dapat direalisasikan oleh perbankan karena :
- 14) Belum adanya kesamaan pemahaman antara perbankan dengan Dinas Teknis

terhadap kriteria penilaian calon debitur yang layak dibiayai KUR

- 15) Terdapat sumber-sumber dana lain yang relatif murah selain KUR yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKMK seperti dana bergulir dari PNPM Mandiri, hibah dari pemerintah dan sumber-sumber dana lainnya.
- 16) Banyaknya keluhan dari calon debitur yang direkomendasikan bahwa perbankan sering meminta agunan tambahan dan banyak calon debitur yang belum memenuhi syarat agunan dari Bank Pelaksana

5. Kesimpulan

Kesimpulan atas hasil analisis kajian percepatan perluasan penyaluran KUR di tingkat provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a) pencapaian progres implementasi percepatan perluasan penyaluran KUR berbeda-beda pada masing-masing Dinas Teknis Pemerintah Provinsi
- b) belum semua Dinas Teknis Pemerintah Provinsi memiliki SOP/PEDUM/JUKNIS/JUKLAK/Surat Edaran tentang KUR
- c) belum optimalnya sinergitas antar lembaga terkait dalam program KUR, baik horizontal maupun vertical seperti dengan perbankan
- d) belum maksimalnya penggunaan database penyaluran KUR

Daftar Pustaka

- Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara 6 (enam) Kementerian dengan 2 (dua) Perusahaan Penjamin dan 6 (enam) Bank Pelaksanaan tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, tanggal 9 Oktober 2007. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Addendum IV tanggal 10 Januari 2012.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-22/M.EKON/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi;

Keputusan Deputi Bidang Koordinasi pada Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, tanggal 25 Januari 2010, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir No. KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, tanggal 1 Februari 2012

Komiter KUR. 2013. <http://www.komite-kur.com/article-84-sebaran-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-periode-november-2007-mei-2013.asp>

Tribun Jabar. 2013. Pemerintah Pangkas Bunga KUR.

Riwayat Penulis:

Aditya Wardhana, SE, M.Si., M.M.

Lahir di Bandung, 15 Juli 1972, Asisten Ahli dalam Ilmu Manajemen. Kandidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan, Bandung.

Zainuddin Iba, SE, M.M.

Kelahiran Desa Blang Dalam Baroh, Aceh Utara, 15 September 1961. Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Pakuan Bogor dan Magister Manajemen dari Unsyiah. DM Bekerja sebagai Dosen di STIE Kebangsaan Bireuen-Aceh.

Lampiran-1. Realisasi KUR Menurut Propinsi (31 Mei 2013)

No	Provinsi	TOTAL		
		TOTAL (Rp Juta)	Outstanding (Rp Juta)	Debitur
1	ACEH	1.962.387	565.774	142.944
2	SUMATERA UTARA	5.832.031	2.394.096	357.012
3	SUMATERA BARAT	3.582.377	1.513.619	203.188
4	RIAU	3.588.448	1.766.730	146.209
5	JAMBI	2.113.964	932.573	123.206
6	SUMATERA SELATAN	4.121.924	1.753.175	161.470
7	BENGKULU	821.820	321.344	63.542
8	LAMPUNG	2.486.949	1.020.923	201.878
9	KEPULAUAN RIAU	844.012	341.380	28.468
10	BANGKA BELITUNG	348.082	134.686	20.405
11	DKI JAKARTA	5.381.428	2.319.991	209.403
12	JAWA BARAT	14.783.626	5.359.195	1.228.413
13	JAWA TENGAH	17.719.003	5.880.880	2.032.797
14	D.I. YOGYAKARTA	2.214.971	861.149	224.926
15	JAWA TIMUR	17.453.360	6.390.002	1.499.687
16	BANTEN	2.419.674	874.363	134.552
17	BALI	2.571.340	1.014.605	202.141
18	NTB	1.413.529	524.498	130.672
19	NTT	1.227.411	427.774	88.883
20	KALIMANTAN BARAT	2.665.652	1.202.247	100.887
21	KALIMANTAN TENGAH	1.753.636	856.259	81.110
22	KALIMANTAN SELATAN	2.872.608	1.270.235	161.634
23	KALIMANTAN TIMUR	3.046.072	1.320.287	147.411
24	SULAWESI UTARA	1.192.077	495.502	82.877
25	SULAWESI TENGAH	1.397.704	583.581	110.073
26	SULAWESI SELATAN	6.630.531	2.518.608	479.944
27	SULAWESI TENGGARA	992.579	398.193	79.543
28	GORONTALO	579.521	163.377	55.453
29	SULAWESI BARAT	624.136	207.716	44.475
30	MALUKU	875.143	284.801	43.765
31	MALUKU UTARA	457.552	157.188	21.507
32	PAPUA BARAT	611.998	263.436	19.914
33	PAPUA	1.168.596	478.372	53.277
		115.754.142	44.596.561	8.681.666

Lampiran-2. Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Bank Nasional (31 Mei 2013)

No	BANK	REALISASI PENYALURAN KUR (Rp. Juta)				NPL (%)
		Plafon	Outstanding	Debitur	Rata-rata Kredit	
1	BNI	13.701.772	5.214.229	216.320	63,3	10,1
2	BRI (KUR Ritel)	14.441.271	6.021.519	87.459	165,1	3,6
3	BRI (KUR Mikro)	56.005.843	17.006.660	7.929.570	7,1	1,8
4	BANK MANDIRI	11.962.730	6.243.123	232.392	51,5	3,5
5	BTN	3.732.124	2.051.861	21.353	174,8	6,9
6	BUKOPIN	1.718.221	734.082	11.448	150,1	4,2
7	BANK SYARIAH MANDIRI	3.176.086	1.834.824	42.935	74,0	6,8
8	BNI SYARIAH	103.169	70.836	665	155,1	3,9
		104.841.217	39.177.134	8.542.142	12,3	4,1

Lampiran-3. Realisasi dan NPL Penyaluran KUR BPD (31 Mei 2013)

No	BANK	REALISASI PENYALURAN KUR (Rp. Juta)				NPL (%)
		Plafon	Outstanding	Debitur	Rata-rata Kredit	
1	BANK NAGARI	1.141.724	574.995	33.828	33,8	2,9
2	BANK DKI	287.189	205.051	2.081	138,0	4,3
3	BANK JABAR BANTEN	2.589.038	1.089.084	23.610	109,7	9,2
4	BANK JATENG	1.391.635	653.610	20.991	66,3	3,3
5	BPD DIY	73.945	31.144	757	97,7	5,1
6	BANK JATIM	3.548.645	1.522.858	33.830	104,9	15,5
7	BANK NTB	121.840	77.712	1.693	72,0	3,8
8	BANK KALBAR	295.450	186.379	2.005	147,4	0,0
9	BANK KALTENG	111.224	68.613	2.454	45,3	3,5
10	BANK KALSEL	277.586	192.464	3.140	88,4	1,6
11	BANK SULUT	53.095	33.675	1.948	27,3	10,5
12	BANK MALUKU	151.568	76.073	3.686	41,1	0,0
13	BANK PAPUA	184.374	132.503	2.225	82,9	2,7
14	BANK ACEH	48.886	43.171	515	94,9	2,1
15	BANK SUMUT	109.884	99.345	896	122,6	0,0
16	BANK RIAU KEPRI	25.329	20.843	241	105,1	1,5
17	BANK JAMBI	28.485	25.073	303	94,0	0,0
18	BANK SUMSEL BABEL	44.291	40.378	481	92,1	0,0
19	BANK BENGKULU	17.577	15.401	174	101,0	0,0
20	BANK LAMPUNG	91.112	81.061	1.040	87,6	0,0
21	BANK BPD BALI	68.804	55.018	762	90,3	1,2
22	BANK NTT	17.459	15.999	205	85,2	0,0
23	BANK KALTIM	182.873	136.680	2.138	85,5	2,0
24	BANK SULTENG	4.936	4.197	80	-	-
25	BANK SULTRA	31.421	25.544	321	97,9	0,0
26	SULSELBAR	14.555	12.555	120	121,3	0,1
	TOTAL	10.912.925	5.419.428	139.524	78,2	7,5
	TOTAL BPD LAMA	10.227.313	4.844.163	132.248	7,3	8,3
	TOTAL BPD BARU	685.612	575.265	7.276	94,2	

Sumber: Komite KUR

Lampiran-4. Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi (31 Mei 2013)

No	SEKTOR EKONOMI	TOTAL (Rp. Juta)		
		Plafon	Outstanding	Debitur
1	Pertanian	18.971.375	8.451.492	1.263.327
2	Perikanan	747.096	322.790	7.030
3	Pertambangan	93.452	50.005	2.177
4	Industri pengolahan	3.117.181	1.542.501	153.828
5	Listrik, gas dan air	54.686	29.841	1.337
6	Konstruksi	1.867.402	706.456	9.324
7	Perdagangan	65.691.057	24.938.393	5.793.583
8	Penyediaan akomodasi	753.821	291.028	29.628
9	Transportasi	1.586.927	991.132	33.867
10	Perantara keuangan	856.878	340.704	4.368
11	usaha persewaan	4.677.591	2.459.403	215.475
12	Adm. Pemerintahan	8.606	1.318	30
13	Jasa pendidikan	58.824	28.263	360
14	Jasa kesehatan	267.823	106.352	3.311
15	Jasa kemasyarakatan	2.904.016	1.115.005	101.567
16	Jasa perorangan	79.850	34.428	753
17	Badan internasional	75	-	1

